



TESIS

Judul:

STATUS HUKUM NOTARIS DAN PPAT YANG
DIPIDANA DI BAWAH LIMA TAHUN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP AKTA YANG
DIBUATNYA

Disusun oleh:

NICHOLAS ALEXANDROS
NIM. 217212020

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Pengesahan

Nama : NICHOLAS ALEXANDROS
NIM : 217212020
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : STATUS HUKUM NOTARIS DAN PPAT YANG DIPIDANA
DI BAWAH LIMA TAHUN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP AKTA YANG
DIBUATNYA
Title : The Legal Status of Notaries and PPATs Who Are
Sentenced Under Five Years and the Responsibility for the
Deed They Made (Case Study: West Jakarta District Court
Decision Number: 248/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2023.

Tim Pengaji:

1. JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 20-Juli-2023

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : NICHOLAS ALEXANDROS
NIM : 217212020
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : STATUS HUKUM NOTARIS DAN PPAT YANG DIPIDANA
DI BAWAH LIMA TAHUN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP AKTA YANG
DIBUATNYA

Proposal Tesis ini disetujui untuk diujii

Jakarta, 31-Mei-2023

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



ABSTRAK

- (A) Nama: Nicholas Alexandros (NIM: 217212020)
- (B) Judul: Status Hukum Notaris Dan PPAT Yang Dipidana Di Bawah Lima Tahun Dan Pertanggungjawaban Terhadap Akta Yang Dibuatnya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 248/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT)
- (C) Halaman: vii + 165 + 37 + 2023
- (D) Kata kunci: Notaris dan PPAT, Akta, Tanggung jawab hukum
- (E) Isi:

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak hukum Notaris dan PPAT terhadap jabatan profesionalnya setelah menjalani masa hukuman pidana serta tanggung jawab hukum yang mereka hadapi setelah selesai menjalani masa hukuman dalam kasus tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan nonhukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, mereka dapat kembali menjabat setelah selesai menjalani masa hukuman tanpa perlu prosedur pengangkatan kembali, namun jika diberhentikan secara tidak hormat, mereka tidak dapat kembali menjabat. Status pemberhentian sementara atau tidak hormat tergantung pada ringan atau beratnya perbuatan yang dilakukan, dengan pidana 5 tahun atau lebih sebagai batasan. Selain itu, Notaris yang diberhentikan sementara harus menyerahkan kembali protokol kepada Notaris yang bersangkutan setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Dalam kasus pelanggaran, penilaian terhadap pelanggaran tersebut harus didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris. Selain itu, Notaris dapat diancam dengan hukuman perdata, pidana, dan administrasi jika tidak menjalankan jabatannya dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ganti rugi harus dilakukan oleh Notaris yang merugikan pihak-pihak terkait.
- (F) Acuan: 37 (1982-2021)
- (G) Pembimbing: Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M
- (H) Penulis:

Nicholas Alexandros

ABSTRACT

- (A) Name: Nicholas Alexandros (NIM: 217212020)
- (B) Title: The Legal Status of Notaries and PPATs Who Are Sentenced Under Five Years and the Responsibility for the Deed They Made (Case Study: West Jakarta District Court Decision Number: 248/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT)
- (C) Page: vii + 165 + 37 + 2023
- (D) Key Word: Notary and PPAT, Deed, Legal responsibility
- (E) Content:

This research aims to explore the legal rights of Notaries and PPATs to their professional positions after serving a criminal sentence as well as the legal responsibilities they face after completing their sentence in certain cases. The research method used is normative legal research using the Law approach. Data is collected through literature study of primary, secondary, tertiary, and non-legal materials. The results show that if a Notary is temporarily dismissed from office, they can return to office after completing their sentence without the need for reappointment procedures, but if they are dishonorably dismissed, they cannot return to office. The status of temporary or dishonorable dismissal depends on the severity of the offense committed, with a sentence of 5 years or more as a limitation. In addition, the temporarily dismissed Notary must hand over the protocol back to the Notary concerned after the temporary dismissal period ends. In the case of misconduct, the assessment of the misconduct must be based on the Notarial Position Law and the code of ethics of the office of Notary. In addition, a Notary may be threatened with civil, criminal, and administrative penalties if he/she does not perform his/her office carefully and in accordance with applicable regulations. Compensation must be made by the Notary who harms the relevant parties.
- (F) Reference: 37 (1982-2021)
- (G) Mentor: Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.
- (H) Writer:

Nicholas Alexandros

KATA PENGANTAR

Terpujilah Sanghyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tri Ratna, serta Boddhisatva-Mahasatva atas pancaran cinta kasih yang tak terbatas dan dukungan karma baik yang telah memberikan perlindungan bagi Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul "**STATUS HUKUM NOTARIS DAN PPAT YANG DIPIDANA DI BAWAH LIMA TAHUN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR: 248/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT)**" ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis dengan tulus menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan juga sebagai dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan kesabaran untuk membantu, mengarahkan, serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara:
3. Seluruh dosen S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi,

serta segala nasihat selama Penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Bapak Widodo selaku kepala staf Pendidikan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis selama di perkuliahan;
5. Kaka Dela Vineza, S. Psi., M.M., selaku staf Pendidikan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam proses ini, serta kepada seluruh karyawan dan staf lainnya yang berada dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Mami tersayang, Nani Kumiasih S.H., yang telah mendidik Penulis dengan kepercayaan, kesabaran dan tak berhenti mendoakan dan menyemangati Penulis;
7. Adik tersayang, Stella Alexandria S.Ked yang tak berhenti mendoakan dan menyemangati Penulis;
8. Teman seperjuangan Penulis Adrian Tanjung, Mulyadie Lie, Nauval Raja Hamnan, S.H., yang senantiasa menasihati, membantu, dan menyemangati Penulis, serta memberikan masukan kepada Penulis;
9. Kepada teman-teman Penulis di luar Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan memberikan semangat dan bantuan tenaga serta pikiran untuk memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan.

10. Kepada para pihak yang tidak disebutkan namanya, yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

Tesis ini tidak hanya dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Magister Kenotariatan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana yang menyangkut pertanggungjawaban Notaris dan PPAT yang melakukan pemalsuan akta autentik. Penulis juga ingin menyampaikan permintaan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan ini, baik dalam hal materi maupun teknik penulisan. Semoga Sanghyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tri Ratna, serta Bodhisattva-Mahasatva memberikan berkat dan keberkahan-Nya kepada semua pihak dan kerabat yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Jakarta, 27 Juni 2023

Nicholas Alexandros

Pernyataan

Nama : NICHOLAS ALEXANDROS
NIM : 217212020
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : STATUS HUKUM NOTARIS DAN PPAT YANG DIPIDANA
DI BAWAH LIMA TAHUN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP AKTA YANG
DIBUATNYA

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27-Juni-2023

Yang menyatakan



NICHOLAS ALEXANDROS
NIM. 217212020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Abstrak.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Konseptual	16
E. Kerangka Teoretis	23
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN	
HUKUM	39
A. Teori Perjanjian.....	39
B. Teori Kewenangan	44
C. Teori Kepastian Hukum	49
D. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	54
E. Teori Penegakan Hukum.....	60
BAB III STATUS PROFESI NOTARIS DAN PPAT YANG DIPIDANA	
DALAM PEMALSUAN AKTA	67

A. Posisi Kasus	67
B. Notaris dan PPAT	69
C. Akta	73
D. Surat Kuasa	76
E. Perjanjian Pengikatan Jual Beli.....	80
F. Akta Jual Beli	84
G. Wawancara	88
 BAB IV TANGGUNGJAWAB NOTARIS DAN PPAT TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA	103
A. Status Hukum Notaris dan PPAT Terhadap Jabatan Profesinya Setelah Menjalani Masa Hukum Pidana	103
B. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Setelah Selesai Menjalani Masa Hukuman	130
 BAB V PENUTUP.....	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran.....	161
 DAFTAR PUSTAKA	